P

Mening

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit

Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan

Indeks Sistem Merit

Indeks Pelayanan Publik

Indeks Kemiskinan Multidimensi

Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas kelembagaan dalam mendukung meritokrasi	Meningkatnya mutu pelayanan publik	Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah
Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP	Nilai LPPD	Hasil Evaluasi Kelembagaan	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal A	Persentase pemenuhan data dukung IKK	Indeks Kematangan Organisasi	Persentase unit pelayanan publik dengan opini pengawasan kategori tertinggi	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Indeks Reformasi Hukum	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan SDA	Rasio Utilitas Aset - Perumda Giri Tirta	Cost to Revenue Ratio - PT Gresik Migas	Pertumbuhan jumlah pelanggan PDAM	Persentase unit pelayanan publik dengan nilai survey kepuasan masyarakat kategori baik	Persentase Kegiatan Pimpinan yang difasilitasi	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi
						Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Rasio santri yang mendapat pembinaan		Rasio Utilitas Aset - BPR Bank Gresik	Cost to Revenue Ratio - Perumda Giri Tirta				Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara
									Rasio Utilitas Aset - PT Gresik Migas	Cost to Revenue Ratio - BPR Bank Gresik				Persentase temuan pada laporan keuangan yang ditindaklanjuti

PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PENATAAN ORGANISASI	ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	PENATAAN ORGANISASI	PENATAAN ORGANISASI	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	PENATAAN ORGANISASI	PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Jumlah Perangkat Daerah dengan capaian kinerja APBD kategori sangat tinggi (91%-100%)	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen SAKIP sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang tersedia	Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi kelembagaannya	Jumlah unit pelayanan publik dengan opini pengawasan kategori tertinggi	Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Produk Hukum yang didokumentasikan	Persentase produk hukum yang ditetapkan	Persentase Usulan Penerima Hibah Lembaga Keagamaan, Masjid, Musholla, dan Bansos Beasiswa yang Terverifikasi	Jumlah santri yang memperoleh pembinaan	Jumlah kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan	Jumlah kebijakan bidang SDA yang ditetapkan	Jumlah aset Perumda Giri Tirta	Jumlah aset BPR Bank Gresik	Jumlah aset PT Gresik Migas	Jumlah pendapatan Perumda Giri Tirta	Jumlah pendapatan PT Gresik Migas	Jumlah pendapatan BPR Bank Gresik	jumlah pelanggan PDAM	Persentase Unit Pelayanan Publik yang menyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Persentase Kegiatan Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang difasilitasi	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN	PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN	PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM	FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD	FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	FASILITASI KEPROTOKOLAN	FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	PENGADAAN MEBEL	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	PENGADAAN SARANA DA PRASARANA PENDUKUN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Anjab	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan